



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

SUMARIU

Periode : Maiu 2009

Edisi : 2009

AKTIVITAS PENGADILAN BAUCAU SELAMA SEMINGGU

Aktivitas Pengadilan Baucau selama seminggu dari tanggal 5/8 bulan 5 tetap berjalan seperti biasa walaupun ada renovasi terhadap pengadilan. Walaupun kadang ada banyak keributan dari proses renovasi yang tidak terlalu jauh dari ruang sidang sehingga membuat orang tidak bisa saling mendengar antara satu dengan yang lain, akan tetapi karena persidangan terhadap semua proses kasus ini sangatlah penting maka para aktor pengadilan dengan sabar dan harus realisasikan persidangan tersebut.

Selama seminggu tersebut, JSMP juga memantau aktivitas pengadilan yang mana kadang kala juga hakim harus menunda persidangan karena semua pihak tidak hadir di Pengadilan. Sehingga ada kasus tertentu harus ditunda juga karena kadang hakim kolektive yang bertugas tidak lengkap. Untuk semua kasus yang telah ditunda tersebut akan terus dilakukan persidangan seperti biasa dalam waktu dekat (pada bulan Juni).

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai informasi tersebut diatas, maka lihatlah rangkuman sebagai berikut:

Baucau, 5/5/09

Pengadilan Baucau pada tanggal 5/5/09 tidak sempat mengadili tiga kasus pidana yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal persidangan sebab Pengacara Privat yang mana menangani kasus tersebut tidak hadir dalam persidangan di pengadilan. Menurut informasi yang didapatkan dari pihak panitera bahwa pengacara privat tidak dapat hadir dalam persidangan karena masalah transportasi dari Dili. Karena alasan tersebut pengadilan mengumumkan untuk menunda persidangan dan melanjutkan kembali persidangan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Mengenai penundaan persidangan ini pengadilan mengingatkan bagi semua pihak untuk hadir dalam persidangan yang telah dijadwalkan.

Berdasarkan pemantauan JSMP di Pengadilan selama ini, semua masalah ini terjadi sudah sangat sering, karena ada masalah transportasi dan halangan yang lainnya yang sangat pelik sehingga menyebabkan semua pihak yang seyogianya harus hadir di Pengadilan tidak hadir.

Hukum juga telah menetapkan dengan tegas bahwa ketika salah satu pihak (tersangka/korban) dari salah satu kasus alpa dalam persidangan maka pengadilan

seharusnya mengumumkan untuk menunda persidangan tersebut di waktu yang lain dan penundaan terhadap kasus tersebut harus dimasukkan/tertulis dalam aktus.

Masalah-masalah demikian banyak kali dan sering semua pengadilan menghadapi masalah yang sama karena ketidakhadiran dan kurang adanya rasa penghargaan terhadap surat notifikasi dari semua pihak terhadap kasus-kasus yang ada. Kadang kala juga karena masalah dari aktor pengadilan yang menangani kasus tersebut.

Untuk semua masalah tersebut diatas jalan keluar yang harus diambil pengadilan adalah harus menunda persidangan ke waktu lain yang memungkinkan pada semua pihak sehingga bisa hadir dan bisa memulai persidangan. Konsekuensi legal untuk semua pihak yang tidak menghargai notifikasi dari pihak pengadilan tersebut diberikan denda dan mandat penangkapan bagi mereka yang tidak taat.

Baucau, 6/5/09

Tuntutan dari pihak Kejaksaan untuk kasus dengan nomor 20/Crm.C/09/TDB ini dilaksanakan hampir selama 2 jam. Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan terakhir menuntut bahwa memang benar ada faktus nyata yang cukup bahwa para terdakwa benar-benar melakukan tindakan pidana perusakan, membakar di tempat kejadian di Sub Distrik Watu-Lari pada tahun 2007. JPU menuntut para terdakwa sebagai aktor materil dari tindak pidana ini. Bukti yang digunakan oleh JPU sebagai aktor materil dari tindak pidana ini berdasarkan pernyataan atau kesaksian dari para saksi dan juga pengakuan sebagian terdakwa di tempat kejadian perkara dan para saksi juga melihat bahwa para terdakwalah yang melakukan tindakan tersesbut.

Sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak merasa ragu terhadap semua tindakan dari para terdakwa. Dengan demikian JPU menuntut para terdakwa dengan pasal 170 (1,2,3) dari KUHAP Timor Leste namun pada akhirnya pihak JPU mengganti pasal tersebut dengan pasal 410 KUHP

Kesimpulan JPU untuk terakhir, yaitu karena memang benar bahwa para terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut maka JPU meminta pada pihak pengadilan untuk menghukum menjatuhkan hukuman pada terdakwa L tidak boleh lebih tinggi dari 5 tahun. Dan bagi terdakwa G serta D, JPU memminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan tidak boleh dibawah 5 tahun.

Pengacara Privat Tome dan Arlindo Sanches yang melakukan pembelaan terhadap terdakwa bahwa kejadian itu terjadi di Sub Distrik Watu-Lari pada tahun 2007 yang mana menuntut para terdakwa sebagai aktor materil karena aksi spontanitas dari massa yang tidak merasa senang dengan hasil pemilihan Parlemen yang mana Presiden Republik Dr Jose Ramos Horta mengumumkan untuk memberikan kekuasaan secara penuh kepada Aliansi Mayoritas Parlemen untuk memerintah.

Sehingga pada awalnya pihak JPU menuntut para terdakwa tidak jelas karena pada saat kejadian tersebut terjadi ada banyak massa yang membakar rumah penduduk dimana pada akhirnya para saksi hanya dapat mengidentifikasi terdakwa dengan jumlah 6 orang yang mana dalam pernyataan mereka mengatakan bahwa pada saat kejadian tersebut

mereka berada pada tempat yang jauh. Dan juga sangat tidak mungkin bagi para terdakwa membakar rumah penduduk yang berjumlah 3000 an dalam waktu yang sama. Pengacara Privat berargumen bahwa “tidak dapat diterima secara logis, karena jarak antara rumah yang dibakar tersebut berjauhan satu dengan yang lain”. Pengacara Privat juga mengatakan bahwa berdasarkan pernyataan dari terdakwa G yang disampaikan pada pengadilan bahwa pada saat kejadian dia berada di tempat yang jauh bersama salah satu kerabatnya.

Pembela juga mengatakan bahwa dalam kesaksian dari para saksi hanya ada satu saksi yang mengatakan bahwa dia mengenal dan melihat terdakwa D pada saat kejadian masih berupaya melindungi korban C dari api yang sedang membakar rumah.

Dengan semua alasan tersebut diatas maka pihak pembela menolak secara total tuntutan dari JPU dan meminta pada pengadilan untuk mengampuni para terdakwa. Artinya pasal 172 (2) KUHP yang dipakai oleh JPU terhadap para terdakwa tidak terbukti. Semua terdakwa mendapatkan tuntutan dengan ancaman hukuman penjara kecuali terdakwa LP, sidang pembacaan putusan akhir akan diadakan pada tanggal 8 Juni 2009.

Baucau, 6/5

Pada hari yang sama pengadilan juga mengadili kasus pidana pengrusakan dengan nomor sidang 19/Crm.s/09/TDB. Dalam kasus ini terdakwa M dan lainnya didakwa oleh JPU dengan tindak pidana pengrusakan terhadap korban TB di wilayah Behulu Riamari Baucau. Para terdakwa pergi ke tempatnya korban dan membongkar secara paksa kios di tanahnya terdakwa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada korban. Para terdakwa juga menyatakan pada pengadilan bahwa sebelum kejadian itu terjadi mereka telah memberitahukan pada pihak korban 5 kali agar pihak korban tidak melanjutkan pembuatan kios di wilayahnya. Akan tetapi pihak korban tetap melanjutkan pembuatan kios tersebut. Dengan kelakuan korban seperti itu disangka sebagai provokasi dan pada akhirnya para terdakwa pergi ke tempat kejadian dan langsung menurunkan kayu yang telah dipasang oleh korban untuk pembuatan kios tersebut.

Melihat pada kelakuan dari para terdakwa tersebut maka pihak JPU menuntut para terdakwa sebagai aktor materil dari kasus ini yang mana melawan pasal 406 KUHP.

Pada kesempatan lain, korban yang juga sebagai saksi dalam kasus ini, bersumpah bahwa ia telah mengalami kerugian barang-barang dari perbuatan para terdakwa tersebut sebesar \$ 250.

Karena pernyataan dari para terdakwa dan juga para saksi ini belumlah cukup untuk pihak pengadilan dalam memutuskan perkara ini maka pengadilan berkeputusan untuk melanjutkannya lagi pada tanggal 19 Mei 2009 dengan mendengarkan lagi para saksi yang diajukan oleh JPU di tempat kejadian perkara tersebut.

Baucau, 7/5

Pada hari kamis 7/5 pengadilan menunda dua kasus pidana terdiri dari kasus pengrusakan dengan nomor perkara 42/crm. C/09/TDB dan kasus kekerasan seksual dengan nomor

perkara 28/cem.c/09/TDB sebab hakim kolektive yang menangani kasus tersebut tidak lengkap. Sehingga pengadilan memutuskan untuk menunda proses kedua kasus ini pada tanggal 10 Juni 2009.

Dalam pengumumannya ketua hakim kolektive bahwa persidangan harus ditunda karena hakim kolektive tidak lengkap. Salah satu hakim yang akan melengkapi proses ini masih berada di Oe-Cusse. Sesuai dengan pemantauan dari JSMP bahwa ini sering kali terjadi karena masih minimnya hakim dan agenda dari para hakim yang menangani kasus saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

Kejadian semacam ini juga membawa impact bagi proses kasus dan menambah banyaknya kasus yang dipending dan juga membuat para pihak tidak percaya akan notifikasi yang diberikan oleh pihak pengadilan, karena ada terdakwa, korban, atau saksi yang datang dari Distrik yang jauh dari pengadilan Baucau. Dalam perjalanan mereka ada banyak hambatan yang mereka hadapi, seperti transportasi dan tempat untuk mereka tinggal.

Baucau, 8/5

Pengadilan Baucau pada hari Jumat 8/5 menunda pembacaan putusan akhir terhadap kasus percobaan pembunuhan dengan nomor kasus 67/crm.c/08/TDB sebab 3 terdakwa dari 7 terdakwa yang dinotifikasi oleh pengadilan tapi tidak hadir di pengadilan. Menurut informasi dari terdakwa lainnya bahwa ketiga terdakwa tidak hadir karena mereka tinggal di Dili. Hanya karena ketiga terdakwa tersebut tidak hadir di pengadilan maka pihak pengadilan lewat ketua hakim kolektive Edite Palmira mengumumkan pada para terdakwa bahwa pembacaan putusan tidak bisa direalisasikan karena terdakwa tidak lengkap. Sehingga pengadilan menunda pembacaan putusan tersebut pada tanggal 14/5/2009.

Untuk proses kasus ini, hakim ketua Edite Palmira juga mengatakan bahwa ketidakhadiran terdakwa perlu untuk dimasukkan pada akta bahwa para terdakwa tidak hadir di pengadilan tanpa ada pemberitahuan pada pengadilan sebelum dan tidak ada alasan yang jelas. Sehingga pengadilan berkeputusan untuk mendenda para terdakwa yang tidak hadir dengan denda \$5 dan pengadilan akan mengeluarkan surat penangkapan bagi mereka karena mereka tidak menghargai surat notifikasi dari pengadilan.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
Luis de Oliveira Sampaio
Direitor Eksekutif JSMP
alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Landline: 3323883